

**KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
MELANTIK PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN
DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP PEMISAHAN KEKUASAAN
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Oleh:

MUHAMMAD ALWI KHOIRI RAMDANI

NIM. 1143050106



**BANDUNG
2018 M/1439 H**